

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggriani, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arenawati. (2014). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darmodiharjo, D. (2016). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT SUN.
- Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hasyimzoem, Y. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kartiwa, A. (2012). *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*. (D. J. Iskandar, Ed.). Bandung: Lepsindo.
- Mardani, M. I. (2011). Pelimpahan kewenangan bupati dalam otonomi daerah. *1411-3341*, 3(1), 547–563.
- Monteiro, J. M. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Muin, F. (2014). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *1978-5186*, 8(1), 69–79.
- Murti, M. S. (2015). Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *2089-9009*, 3.
- Pratama, R. P. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan meninggal Dunia, 6, 1–15.
- Raharja, D. A. L. (2017). Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana. *2502-3101*, 6, 78–88.
- Riyanto, A., & Bhakti, R. T. A. (2012). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Oleh Pengadilan Agama Kota Batam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *1411-9536*, 18(2), 269–293. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30649/phj.v18i2>
- Rosidin, U. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sambas, A. L. (2016). *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yusa, I. G. (2016). *hukum Tata Negara*. (B. Hermanto, Ed.). Malang: Setara Press.

Zaenuddin, M. (2017). Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian DiKota Batam. *2548-9909, 1(2)*, 73–85.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Undang-Undang No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Keputusan Presiden No 41 tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Presiden No 44 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam